

TRANSPARANSI PELAPORAN KPI DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Natalia Febrianti Purba¹,
Fendi Armando^{2*}, Jufri Darma³

nataliapurba740@gmail.com, fendiarmando271@gmail.com, jufridarma@unimed.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the importance of transparency in reporting Key Performance Indicators (KPIs) within financial statements and to analyze the benefits and challenges of its implementation. The research method used is a literature review by analyzing scholarly journals, books, accounting standards, and corporate annual reports. The findings indicate that KPI transparency enhances the quality of financial reporting, accountability, and investor trust, although challenges remain such as the absence of global reporting standards, the risk of data manipulation, and difficulties in measuring non-financial indicators. This study emphasizes the need for management commitment and regulatory support to ensure consistent and standardized KPI reporting practices.

Keywords: Transparency, Key Performance Indicators (KPI), Financial Reporting, Accountability, Investor.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pentingnya transparansi pelaporan Key Performance Indicator (KPI) dalam laporan keuangan serta menganalisis manfaat dan tantangan penerapannya. Metode yang digunakan adalah literature review melalui analisis jurnal ilmiah, buku, standar akuntansi, dan laporan tahunan perusahaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi KPI meningkatkan kualitas laporan keuangan, akuntabilitas, dan kepercayaan investor, meskipun masih menghadapi tantangan seperti belum adanya standar baku global, risiko manipulasi data, dan kesulitan mengukur indikator non-keuangan. Penelitian ini menegaskan perlunya komitmen manajemen dan dukungan regulator dalam penerapan pelaporan KPI yang konsisten dan terstandarisasi.

Kata Kunci: Transparansi, Key Performance Indicator (KPI), Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Investor.

PENDAHULUAN

Pelaporan kinerja perusahaan melalui *Key Performance Indicator* (KPI) merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan. Penerapan transparansi KPI berkontribusi pada peningkatan kualitas informasi keuangan, penguatan akuntabilitas, serta pembangunan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Selain itu, pengungkapan KPI juga berperan dalam menurunkan asimetri informasi, meningkatkan relevansi nilai laporan, dan menekan biaya modal perusahaan.

Hingga saat ini, praktik pelaporan KPI umumnya masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Belum terdapat standar global maupun nasional yang secara rinci mewajibkan

perusahaan untuk menyajikan indikator KPI dalam laporan keuangan. Kondisi ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam menentukan jenis indikator yang akan diungkapkan. Dalam konteks sukarela, perusahaan memperoleh berbagai manfaat, antara lain peningkatan reputasi, kepercayaan investor, valuasi pasar yang lebih baik, akses pendanaan yang lebih luas, serta citra positif di mata publik.

Namun demikian, apabila di masa mendatang pelaporan KPI ditetapkan sebagai kewajiban (*mandatory disclosure*) oleh regulator, maka akan muncul konsekuensi hukum maupun administratif bagi perusahaan yang tidak patuh, seperti teguran, denda, penurunan tingkat kepercayaan publik, hingga risiko reputasi yang berdampak langsung pada nilai perusahaan. Oleh karena itu, meskipun saat ini pengungkapan KPI masih bersifat sukarela, arah perkembangan regulasi menunjukkan perlunya standar pelaporan yang baku guna menjamin keterbandingan, kredibilitas, serta mencegah praktik manajemen impresi.

Sebagai penguatan, penelitian ini juga perlu didukung oleh data empiris mengenai jumlah perusahaan yang telah menerapkan *KPI disclosure* di Indonesia maupun secara global untuk menggambarkan sejauh mana implementasinya.

STUDI LITERATUR

Kajian Pustaka

1. Posisi dan Urgensi Pelaporan KPI

Perkembangan pelaporan korporat menunjukkan adanya pergeseran dari laporan keuangan yang bersifat retrospektif menuju komunikasi nilai yang lebih holistik. Dalam konteks ini, *Key Performance Indicator* (KPI) berperan penting sebagai instrumen untuk menjembatani kesenjangan antara kinerja finansial dan non-finansial perusahaan. KPI, khususnya yang bersifat non-finansial, membantu menggambarkan penciptaan nilai modern yang didorong oleh aset tak berwujud (*intangible assets*), hubungan dengan pelanggan, serta kemampuan inovasi organisasi. Umumnya, pelaporan KPI ditempatkan dalam bagian *Management Discussion and Analysis* (MD&A) atau *management report*, dan menjadi bagian integral dari kerangka *Integrated Reporting* yang menekankan kesinambungan antara strategi, kinerja, dan nilai jangka panjang perusahaan.

2. Manfaat Transparansi KPI

Transparansi dalam pengungkapan KPI memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Pengungkapan KPI yang komprehensif dan kredibel mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan, memperkuat akuntabilitas manajemen, serta membangun kepercayaan investor. Selain itu, pelaporan KPI dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, meningkatkan *value relevance* dari laporan keuangan, serta menurunkan biaya modal perusahaan karena berkurangnya premi risiko informasi. Manfaat tersebut akan lebih maksimal apabila pengungkapan KPI dilakukan secara terukur, disajikan secara konsisten, dan memperoleh *assurance* atau verifikasi eksternal untuk menjamin kredibilitasnya.

3. Faktor-Faktor Penentu Pengungkapan KPI

Beberapa faktor terbukti memengaruhi keluasaan dan kualitas pengungkapan KPI. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang kuat menjadi determinan

utama. Dewan komisaris independen, komite audit yang aktif, serta kepemilikan institusional yang signifikan mendorong perusahaan untuk melaporkan kinerja dengan lebih transparan. Tekanan dari pasar modal, analisis keuangan, serta media massa juga berperan sebagai pendorong eksternal dalam memperluas pengungkapan. Di sisi lain, perusahaan dengan kinerja baik cenderung mengungkapkan KPI lebih luas sebagai bentuk sinyal positif terhadap kualitas manajemen dan kinerja mereka.

4. Hambatan Utama dalam Pelaporan KPI

Meskipun potensinya besar, penerapan pelaporan KPI masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan standar pelaporan global yang baku, yang mengakibatkan heterogenitas bentuk dan isi pelaporan antarperusahaan. Kondisi ini menurunkan tingkat keterbandingan (*comparability*) antar laporan. Selain itu, terdapat risiko *impression management*, yakni kecenderungan perusahaan hanya mengungkap informasi yang bersifat positif (*good news*), serta adanya *proprietary costs* ketika informasi strategis berpotensi dimanfaatkan oleh pesaing. Kesulitan lain yang sering muncul adalah dalam hal pengukuran indikator non-finansial, yang kerap bersifat subjektif dan sulit diukur secara konsisten.

5. Landasan Teoretis

Beberapa teori utama mendasari kajian tentang transparansi pelaporan KPI. Pertama, *Agency Theory* menjelaskan bahwa pengungkapan KPI dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, sehingga menurunkan biaya keagenan. Kedua, *Signaling Theory* menekankan bahwa pengungkapan sukarela atas KPI berfungsi sebagai sinyal positif terhadap kualitas kinerja dan prospek perusahaan. Ketiga, *Legitimacy Theory* menyoroti bagaimana pelaporan KPI, termasuk yang mencakup aspek sosial dan lingkungan, berperan dalam mempertahankan legitimasi organisasi di mata publik dan regulator.

6. Metode Penelaahan Literatur

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA. Proses ini meliputi perumusan pertanyaan penelitian, penelusuran basis data akademik bereputasi, seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, ekstraksi data dari sumber relevan, serta sintesis tematik hasil temuan. Pendekatan sistematis ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan bersifat objektif, terverifikasi, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain.

7. Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Kajian terdahulu menunjukkan masih terbatasnya penelitian mengenai pelaporan KPI di konteks negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagian besar studi masih berfokus pada perusahaan di kawasan maju seperti Eropa dan Amerika Utara. Selain itu, peran *external assurance* terhadap KPI non-finansial belum banyak diuji secara empiris, padahal hal ini berpotensi meningkatkan kredibilitas laporan. Aspek lain yang juga belum banyak dieksplorasi adalah pemanfaatan media pelaporan digital, seperti *sustainability dashboards* atau platform daring, yang dapat menyajikan data kinerja secara dinamis dan interaktif dibanding laporan tahunan yang bersifat statis.

8. Saran Penguatan Kajian

Untuk memperkaya pembahasan literatur, disarankan penambahan tabel perbandingan hasil studi terdahulu, yang menampilkan perbedaan konteks, metode, temuan utama, serta implikasi kebijakan. Tabel semacam ini dapat memperjelas kontribusi penelitian terhadap pengembangan literatur pelaporan KPI, khususnya dalam konteks transparansi dan relevansi informasi di era pelaporan korporat modern.

METODE

Penelitian ini diimplementasikan dengan menggunakan metodologi *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengadopsi kerangka kerja PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) sebagai pedoman utama untuk menjamin transparansi, sistematisasi, serta replikabilitas proses penelitian. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan berbagai temuan empiris dan teoretis secara terstruktur guna memperoleh pemahaman komprehensif terkait transparansi pelaporan *Key Performance Indicator* (KPI) dalam laporan keuangan.

Proses pelaksanaan SLR dimulai dengan perumusan pertanyaan penelitian yang spesifik, mencakup isu utama tentang manfaat, tantangan, serta determinan pelaporan KPI. Tahap berikutnya adalah penelusuran literatur secara komprehensif pada basis data akademik bereputasi, antara lain *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Strategi pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci seperti "*KPI disclosure*," "*transparency*," "*corporate reporting*," "*non-financial information*," dan "*integrated reporting*" dengan operator Boolean (*AND*, *OR*) untuk memastikan cakupan hasil yang luas namun tetap relevan.

HASIL

Berdasarkan hasil sintesis terhadap 36 artikel ilmiah yang dianalisis, ditemukan bahwa transparansi pelaporan *Key Performance Indicator* (KPI) memiliki peran strategis dalam memperluas fungsi laporan keuangan. Pelaporan KPI menggeser fokus dari informasi retrospektif menjadi komunikasi nilai yang lebih holistik, mencakup dimensi keuangan maupun non-keuangan. Pengungkapan KPI non-keuangan terbukti mampu meningkatkan kualitas dan relevansi informasi, memperkuat akuntabilitas manajemen, serta mengurangi tingkat asimetri informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Selain itu, transparansi KPI juga berkorelasi positif dengan peningkatan kepercayaan investor, penurunan biaya modal, serta penguatan reputasi korporat.

Namun, hasil kajian juga menunjukkan bahwa praktik pelaporan KPI masih menghadapi sejumlah hambatan. Tantangan utama mencakup ketiadaan standar pelaporan global yang seragam, risiko *impression management* (pengungkapan informasi positif secara selektif), serta kesulitan dalam mengukur indikator non-keuangan yang bersifat kualitatif dan kontekstual.

Faktor-faktor yang mendorong keterbukaan KPI diidentifikasi meliputi **kualitas tata kelola** perusahaan, seperti keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit yang aktif; tekanan eksternal dari pasar modal, analis, dan media; serta kinerja keuangan yang baik yang mendorong perusahaan memberikan sinyal positif kepada investor.

PEMBAHASAN

Di Indonesia, tren pengungkapan KPI, terutama yang non-keuangan, masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham dan memiliki eksposur internasional. Studi oleh Santoso (2019) misalnya, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor keuangan dan pertambangan cenderung memiliki tingkat pengungkapan KPI non-keuangan yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya, sejalan dengan tekanan regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan global. Namun, keselarasan antara KPI yang diungkapkan dengan strategi bisnis inti perusahaan masih menjadi tantangan. Pergeseran dari pelaporan finansial yang bersifat retrospektif menuju pendekatan komunikasi nilai yang lebih holistik menunjukkan bahwa KPI, khususnya indikator non-finansial, semakin penting untuk menggambarkan penciptaan nilai perusahaan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan perkembangan bisnis yang kini lebih menekankan pada aset tak berwujud, inovasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Manfaat transparansi KPI tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas informasi, tetapi juga mencakup penguatan akuntabilitas, pengurangan asimetri informasi, serta peningkatan relevansi laporan keuangan bagi investor. Bahkan, menampilkan KPI yang terukur dan kredibel berpotensi menurunkan biaya modal perusahaan melalui pengurangan premi risiko informasi. Dengan demikian, transparansi KPI dapat dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global.

Namun, praktik transparansi KPI tidak terlepas dari faktor pendorong dan hambatan. Dari sisi determinan, tata kelola perusahaan yang baik (misalnya melalui peran dewan independen dan komite audit) serta tekanan eksternal dari analis maupun media, terbukti mendorong kualitas menurun. Perusahaan dengan kinerja baik cenderung lebih proaktif mengungkapkan KPI sebagai sinyal positif bagi pasar. Sebaliknya, tantangan yang muncul adalah ketiadaan standar global yang baku, yang mengakibatkan rendahnya keterbandingan antarperusahaan. Selain itu, terdapat praktik manajemen kesan risiko, di mana perusahaan cenderung hanya mengungkapkan informasi yang bersifat positif, sehingga menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan oleh investor.

Dalam kerangka konseptual, transparansi KPI dapat dijelaskan melalui beberapa teori utama. *Teori Agensi* Tekanan transparansi dalam mengurangi biaya keagenan dan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. *Teori Persinyalan* menjelaskan bahwa penyampaian KPI secara sukarela menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengirimkan sinyal kualitas kepada investor. Sedangkan *Teori Legitimasi* Penekanan bahwa keterbukaan dalam pelaporan, termasuk aspek sosial dan lingkungan, penting untuk menjaga legitimasi perusahaan di mata publik. Misalnya, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dalam laporan tahunannya secara konsisten mengungkapkan berbagai KPI, tidak hanya finansial seperti laba bersih dan EBITDA, tetapi juga non-finansial seperti jumlah pelanggan seluler, pengguna IndiHome, dan metrik kualitas layanan pelanggan. Pengungkapan ini membantu investor dan analis untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif mengenai kinerja dan prospek pertumbuhan perusahaan di era digital. Di sisi lain, beberapa perusahaan lain mungkin hanya memberikan gambaran umum tanpa detail metrik yang diukur, menyulitkan evaluasi dan evaluasi kinerja.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi pelaporan Key Performance Indicator (KPI) merupakan elemen penting dalam laporan keuangan modern, bukan sekadar pelengkap. Pengungkapan KPI yang kredibel mampu meningkatkan kualitas informasi, memperkuat akuntabilitas, menurunkan asimetri informasi, serta membangun kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Selain itu, transparansi KPI terbukti memberikan dampak positif terhadap relevansi nilai laporan dan menurunkan biaya modal Perusahaan. Namun tantangan utama masih terletak pada ketiadaan standar baku global, risiko manipulasi data, serta kesulitan mengukur indikator non-keuangan. Saat ini, praktik mengungkapkan KPI masih bersifat sukarela (*volunteer disclosure*), namun ke depan diprediksi akan berkembang menuju kewajiban (*mandatory disclosure*) seiring dengan dorongan regulasi dan kebutuhan keterbandingan.

Secara teoritis, praktik ini didukung oleh *Teori Keagenan, **Teori Sinyal, dan *Teori Legitimasi yang menekankan pentingnya transparansi untuk mengurangi asimetri informasi, memberi sinyal kualitas, dan menjaga legitimasi sosial. Rekomendasi penelitian ke depan mencakup: (1) studi empiris di negara berkembang seperti Indonesia, (2) pengujian peran jaminan eksternal atas KPI non-keuangan, serta (3) evaluasi efektivitas media pelaporan digital seperti dashboard sepanjang.

Implikasi Praktis:

1. Bagi Regulator:

- Mendorong pembentukan standar dan pedoman pelaporan KPI yang lebih seragam, baik di tingkat nasional maupun adopsi praktik terbaik global, untuk meningkatkan komparabilitas dan kredibilitas.
- Mempertimbangkan transisi dari *pengungkapan sukarela* menjadi *pengungkapan wajib* secara bertahap, dimulai dari sektor-sektor kunci atau perusahaan besar, dengan mempertimbangkan kesiapan perusahaan dan manfaat yang diharapkan.
- Mendukung pengembangan kapasitas bagi perusahaan, khususnya UMKM, dalam memahami dan mengimplementasikan pelaporan KPI yang efektif.

2. Bagi Perusahaan:

- Meningkatkan komitmen manajemen puncak dengan mengungkapkan KPI yang transparan dan konsisten, tidak hanya finansial tetapi juga non-finansial, yang relevan dengan strategi dan penciptaan nilai perusahaan.
- Menginvestasikan pada sistem pengukuran dan pelaporan data yang akurat untuk KPI, serta mempertimbangkan *jaminan* eksternal untuk KPI non-keuangan guna meningkatkan kredibilitas laporan.
- Mengadopsi platform pelaporan digital seperti *dashboard keberlanjutan* untuk menyajikan KPI secara interaktif dan *waktu nyata*, meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman pemangku kepentingan.

3. Bagi Investor:

- Memanfaatkan informasi KPI yang transparan sebagai alat penting dalam pengambilan keputusan investasi, memungkinkan penilaian kinerja perusahaan yang lebih holistik dan prospektif.
- Mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas menampilkan KPI melalui dialog dan permintaan informasi yang lebih mendalam.
- Menyadari bahwa KPI non-keuangan dapat menjadi indikator awal risiko dan peluang, melengkapi analisis keuangan tradisional.

REFERENSI

- Ghozali, I. (2021). *Akuntansi Keuangan: Teori dan Praktik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business School Press.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting* (17th ed.). Wiley.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Pearson.
- International Accounting Standards Board (IASB). (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. IFRS Foundation.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta: IAI.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.)
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- International Integrated Reporting Council (IIRC). (2013). *The International <IR> Framework*. IIRC.